



**PEMERINTAH
KOTA CILEGON**

**RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BPKPAD KOTA
CILEGON**

**Komplek Sukmajaya Mandiri
Jl. Ahmad Yani, Sukmajaya,
Kec. Jombang, Kota Cilegon,
Banten 42416**



RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

yang ...

- yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan - Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun ...

- Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 14. Peraturan ...

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD Kota Cilegon Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.

(2) APBD ..

- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp2.305.503.237.836,00 (*Dua Trilyun Tiga Ratus Lima Milyar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp2.224.218.009.911,00
b. Belanja Daerah	Rp2.305.503.237.836,00
Defisit/Surplus	Rp (81.285.227.925,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp 81.285.227.925,00
2. Pengeluaran	Rp 0,00
Pembiayaan Netto	Rp 81.285.227.925,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp0,00 (nihil)

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.224.218.009.911,00 (*Dua Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan belas Juta Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.058.331.851.911,00 (*Satu Trilyun Lima Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak ...

- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.454.402.604,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.389.906.829,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.163.404.216,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam belas Rupiah*).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.324.138.262,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*)

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.165.886.158.000,00 (*Satu Trilyun Seratus Enam*

Puluh ...

Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.093.242.739.000,00 (*Satu Trilyun Sembilan Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp72.643.419.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil) yang terdiri atas:
- a. pendapatan hibah.
 - b. dana darurat dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Pasal 7 ...

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.305.503.237.836,00 (*Dua Trilyun Tiga Ratus Lima Milyar Lima Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp2.009.312.966.943,20 (*Dua Trilyun Sembilan Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Dua Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp977.559.510.086,10 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Puluh Enam Koma Sepuluh Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp960.960.291.357,10 (*Sembilan Ratus Enam Puluh Milyar ...*

Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Koma Sepuluh Rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp498.600.000,00 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.871.805.500,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.422.760.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp264.101.099.692,80 (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Satu Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah.
 - b. belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.536.644.182,80 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Koma Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.312.416.397,60 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Dua belas Juta Empat Ratus Enam belas Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp136.797.369.465,60 (*Seratus Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Koma Enam Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.755.106.180,80 (*Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Koma Delapan Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.581.563.466,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp118.000.000,00 (*Seratus Delapan belas Juta Rupiah*).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp32.089.171.200,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp81.285.227.925,00 (*Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp81.285.227.925,00 (*Delapan Puluh Satu*

Milyar ...

Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.285.227.925,00 (*Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

(7) Penerimaan ...

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*) yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00(nihil).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nihil*)
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nihil).

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar -Rp81.285.227.925,00 (*Minus Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp Rp81.285.227.925,00 (*Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cilegon tahun anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan ...

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Akun, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Hibah;
 - d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Lampiran ...

- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran belanja bagi hasil;
 - g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII rincian dana bagi hasil-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam, DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja dan pembiayaan;
 - i. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - j. Lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah Provinsi / kabupaten / kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Peraturan Wali kota Cilegon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dan Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal
WALI KOTA CILEGON,

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

MAMAN MAULUDIN
BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah

Nomor :

Tanggal :

KOTA CILEGON
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025



KOTA CILEGON
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.058.331.851.911,00
4.1.01	Pajak Daerah	880.454.402.604,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.500.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.000.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.000.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	324.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	324.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	20.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	20.000.000,00
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	1.000.000,00
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	1.000.000,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	153.000.000,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	153.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	800.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	800.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	800.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.100.000.000,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	636.000.000,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	636.000.000,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	132.000.000,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	132.000.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	332.000.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	332.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	225.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	225.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	225.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	202.654.402.604,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	202.654.402.604,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	202.654.402.604,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	296.400.000.000,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	45.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	33.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	12.000.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	227.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	140.200.000.000,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	86.800.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	15.500.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	15.277.000.000,00
4.1.01.19.03.0005	PBJT-Motel	100.000.000,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	113.000.000,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	10.000.000,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	1.900.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.900.000.000,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	7.000.000.000,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	3.231.000.000,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	10.000.000,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	2.000.000,00
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	10.000.000,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	2.500.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.230.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	2.000.000,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	10.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	5.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	78.000.000.000,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	78.000.000.000,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	78.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	72.000.000.000,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	72.000.000.000,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	72.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	130.389.906.829,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	109.502.250.795,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	104.263.850.795,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	15.352.862.000,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	88.862.488.795,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	48.500.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.495.000.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.495.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.070.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.070.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.673.400.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	373.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	549.400.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	751.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.387.656.034,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	88.650.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	88.650.000,00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	168.550.000,00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	168.550.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.130.456.034,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.130.456.034,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	14.500.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.500.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.500.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	6.000.000.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	6.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.163.404.216,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	26.163.404.216,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.763.404.216,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.763.404.216,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	15.000.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	15.000.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	4.400.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	4.400.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.324.138.262,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	657.500.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	657.500.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	657.500.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	3.037.819.473,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.037.819.473,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.037.819.473,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	500.000.000,00
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	500.000.000,00
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	500.000.000,00
4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	500.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	10.000.000.000,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	150.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	150.000.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	150.000.000,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	562.834.789,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	562.834.789,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	562.834.789,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	110.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.700.000.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	5.000.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	5.000.000,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	5.000.000,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000,00
4.1.04.12.14.0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	7.000.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.616.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	1.616.000.000,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	67.000.000,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	40.000.000,00
4.1.04.12.19.0003	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	5.000.000,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	12.000.000,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	5.000.000,00
4.1.04.12.19.0018	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	5.000.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	56.000.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	56.000.000,00
4.1.04.13.02.0046	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah	56.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	800.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	800.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	800.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	4.249.984.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.249.984.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	4.249.984.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.165.886.158.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.093.242.739.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	178.541.115.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	177.454.623.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	1.142.367.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	176.312.256.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.086.492.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	90.457.000,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	535.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	23.806.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	971.694.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	659.411.678.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	541.030.976.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	541.030.976.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	118.380.702.000,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.600.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.969.413.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	52.521.643.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	43.325.810.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	6.963.836.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	255.289.946.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	69.608.256.000,00
4.2.01.09.01.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.850.000.000,00
4.2.01.09.01.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	1.400.000.000,00
4.2.01.09.01.0066	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-PAUD	399.965.000,00
4.2.01.09.01.0067	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SD	207.928.000,00
4.2.01.09.01.0068	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMP	324.900.000,00
4.2.01.09.01.0079	DAK Fisik-Bidang Jalan-Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi	26.426.583.000,00
4.2.01.09.01.0092	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	29.998.880.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	185.681.690.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	61.892.280.000,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.747.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	91.440.295.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	491.736.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.288.813.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	6.655.323.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.709.446.000,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690.000,00
4.2.01.09.02.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	500.000.000,00
4.2.01.09.02.0025	DAK Non Fisik-PK2UMK	3.435.769.000,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.071.730.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	180.000.000,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	2.118.360.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	509.998.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	72.643.419.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	72.643.419.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	72.643.419.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	45.643.419.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	27.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.224.218.009.911,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.009.312.966.943,20
5.1.01	Belanja Pegawai	977.559.510.086,10
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	473.199.216.208,94
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	321.967.270.119,46
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	251.376.516.867,42
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	70.590.753.252,04
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.734.205.061,02
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.942.862.536,94
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.791.342.524,08
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.079.905.196,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.079.905.196,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.924.236.416,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	19.246.749.206,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.677.487.210,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.815.961.556,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.604.519.452,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	211.442.104,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.386.236.871,02
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.578.207.086,02
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.808.029.785,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	32.051.083.518,06
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.341.668.998,06
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.709.414.520,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.836.234,04
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.623.238,88
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.212.995,16
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	29.797.763.659,40
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.126.111.732,40
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.671.651.927,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	733.963.432,30
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	579.836.955,28
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	154.126.477,02
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.228.980.003,64
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.765.645.743,60
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	463.334.260,04
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	454.774.142,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	187.383.902,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	267.390.240,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	461.230.744.094,16
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	339.336.031.752,16
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	293.529.871.752,10
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	45.806.160.000,06
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.743.872.000,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12.532.672.000,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	211.200.000,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	452.400.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	452.400.000,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	108.698.440.342,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	178.843.750,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	25.451.875,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	43.577.975,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	4.476.883.261,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	232.955.538,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	10.276.488.780,00
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.078.900.000,00
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.807.350.000,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	40.000.000,00
5.1.01.02.06.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	48.080.472,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	40.000.000,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	11.531.848,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	8.373.000,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	348.600.000,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	131.945.144,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	83.878.122.699,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	491.736.000,00
5.1.01.02.06.0069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.579.600.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	30.252.174.436,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.220.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.220.800,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	164.064.600,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	164.064.600,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	34.941.375,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	34.941.375,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.176.000.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.176.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.200.000,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.200.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.574.679.267,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	132.449.267,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.000.000,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.230.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.434.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.422.800.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.422.800.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	260.008.294,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	260.008.294,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.902.710.569,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	108.900.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	108.900.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.057.200,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.057.200,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.200.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.200.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.976.362,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	5.976.362,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.800,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.400.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	8.400.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.000,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	348.000,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.585.026.207,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	11.868.750,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.110.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.901.250,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	354.375.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	36.391.207,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	781.755.000,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	205.725.000,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	189.900.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	87.400.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	8.000.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	8.000.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	71.400.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.134.276.792,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.821.796.792,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.821.796.792,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	8.840.387.986,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	8.840.387.986,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	8.840.387.986,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	960.960.291.357,10
5.1.02.01	Belanja Barang	166.596.285.038,34
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	166.339.472.041,14
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.268.701.220,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	553.546.570,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.508.055.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	6.939.600,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	719.632.070,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	211.526.040,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	49.949.440,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	157.360.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.667.779.714,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	348.193.543,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	280.784.500,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	887.107.711,00
5.1.02.01.01.0017	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	16.850.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	171.130.700,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	131.854.500,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	1.519.977.616,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.614.339.912,88
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.084.021.113,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.549.792.373,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	562.241.306,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.255.174.994,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.568.001.327,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.305.102.860,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.669.124.930,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.168.544.359,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.411.620.780,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.145.273.750,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	4.086.934.472,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	87.497.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.509.956.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	33.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	12.089.814.348,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	141.844.400,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	665.520.640,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.162.498.672,26
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.134.491.720,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	720.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	4.329.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	75.540.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	523.124.430,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	664.235.430,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	6.660.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	183.180.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	74.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.216.450.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	127.770.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	256.812.997,20
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	170.820.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	81.942.997,20
5.1.02.01.04.0122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	450.000,00
5.1.02.01.04.0237	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02	Belanja Jasa	463.274.224.230,56
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	334.594.565.042,08
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.964.400.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.020.896.688,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.929.290.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	330.600.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	15.372.091.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	527.500.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	86.920.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	17.460.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	276.200.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.716.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	34.757.540.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	762.410.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.403.317.700,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	6.754.580.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	668.100.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	255.750.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.248.540.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	8.825.920.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	226.920.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	510.100.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.423.010.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	14.700.598.075,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	27.781.620.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.802.093.554,22
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	30.055.660.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	15.253.147.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	354.910.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	69.153.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.034.200.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	975.855.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	122.066.711,40
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.899.332.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	175.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	23.976.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	473.001.955,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	82.017.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.428.706.952,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.031.183.633,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.490.098.994,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	30.477.050.224,46
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.535.597.285,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.738.236.600,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	23.021.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	126.511.410,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.079.831.800,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.832.236.060,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	7.100.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.136.136.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	276.800.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.294.039.400,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	37.840.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	56.983.695.550,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	40.090.075.200,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.558.905.600,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.500.104.970,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.833.609.780,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	2.001.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	42.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	42.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.301.656.240,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	756.000.000,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	221.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.236.392.500,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.270.163.340,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	237.866.000,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	4.162.500,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	60.000.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	14.208.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.639.388.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.971.260.000,00
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5.827.500,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	84.800.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	205.638.000,00
5.1.02.02.04.0425	Belanja Sewa Peralatan Bantu	594.950.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.104.010.128,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	2.501.400.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	365.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.342.820.450,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.325.981.500,00
5.1.02.02.05.0062	Belanja Sewa Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	568.808.178,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	300.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	18.898.075.209,48
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	52.038.400,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.025.113.490,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	511.436.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	732.601.800,00
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	2.968.944.800,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.576.617.412,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.980.806.210,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	490.655.200,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	670.053.064,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.727.124.060,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.547.058.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.298.127.070,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	1.317.499.703,48
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	571.378.560,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	46.680.810,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	163.697.750,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	361.000.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	171.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	16.500.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	155.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.508.028.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.572.068.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	4.056.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	879.960.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	7.436.200.775,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	31.587.500,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	11.958.125,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.860.775,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.923.750.000,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.780.875.000,00
5.1.02.02.13.0019	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.552.044.375,00
5.1.02.02.13.0020	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	568.575.000,00
5.1.02.02.13.0021	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	559.550.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	73.000.000,00
5.1.02.02.14.0032	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	73.000.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	290.114.726,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	290.114.726,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.306.409.309,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.975.218.088,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	275.000.000,00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	35.000.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	200.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	239.760.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	112.850.400,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.029.069.800,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	11.290.433.178,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.102.090.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.596.960.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	448.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	1.867.688.010,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	370.000.000,00
5.1.02.03.02.0064	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	36.000.000,00
5.1.02.03.02.0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	239.904.300,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	14.056.200,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	92.760.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	383.050.000,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	94.982.400,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	97.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.001.298.700,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	73.320.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	134.285.000,00
5.1.02.03.02.0168	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	113.220.000,00
5.1.02.03.02.0245	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	8.250.000,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	19.000.000,00
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	84.000.000,00
5.1.02.03.02.0345	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	356.064.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	961.265.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	625.251.100,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	74.160.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.174.201.221,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.284.281.221,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	889.920.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	120.990.000,00
5.1.02.03.04.0105	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	120.990.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	36.000.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	36.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.831.614.019,20
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.314.523.251,20
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.678.261.801,20
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.327.560.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.017.370.450,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.291.331.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	517.090.768,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	517.090.768,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.228.350.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	54.177.150.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.236.750.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	27.000.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	7.200.000,00
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	20.102.400.000,00
5.1.02.05.01.0009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	4.830.800.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.051.200.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	44.051.200.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	55.587.049.983,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	54.931.559.983,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	53.616.559.983,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.315.000.000,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	568.520.000,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	568.520.000,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	86.970.000,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	86.970.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	55.303.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	55.303.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	55.303.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.081.055.777,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.081.055.777,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	91.081.055.777,00
5.1.04	Belanja Subsidi	498.600.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	498.600.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	498.600.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	498.600.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	64.871.805.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	54.189.773.500,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	54.064.773.500,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	54.064.773.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	100.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	25.000.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.832.432.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.832.432.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.832.432.000,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.849.600.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.683.210.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.683.210.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	2.166.390.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesenjangan	2.166.390.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.422.760.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.744.200.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.744.200.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.744.200.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.056.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.056.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.056.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	622.560.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	622.560.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	622.560.000,00
5.2	BELANJA MODAL	264.101.099.692,80
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.536.644.182,80
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	9.536.644.182,80
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.456.157.125,80
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.456.157.125,80
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	200.000.000,00
5.2.01.01.02.0001	Belanja Modal Tanah Basah	200.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	7.880.487.057,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	6.036.987.057,00
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	1.843.500.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.312.416.397,60
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.242.628.475,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	801.516.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.01.01.0005	Belanja Modal Hauler	631.516.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	170.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	441.112.475,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	18.000.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	120.230.425,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	22.320.000,00
5.2.02.01.03.0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	140.517.300,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	140.044.750,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.325.452.555,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.175.101.855,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	835.211.855,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	204.890.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	135.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	87.050.700,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	87.050.700,00
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	63.300.000,00
5.2.02.02.05.0001	Belanja Modal Kapal Terbang	63.300.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	328.060.198,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	110.335.835,00
5.2.02.03.01.0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	47.398.630,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	1.037.850,00
5.2.02.03.01.0004	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	2.960.425,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	58.938.930,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	10.353.363,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	858.363,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	9.495.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	207.371.000,00
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	183.820.000,00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	1.351.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	22.200.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	284.858.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	284.858.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	8.000.000,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	19.950.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	194.250.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	62.658.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.273.768.493,30

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.823.146.591,90
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	18.349.920,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	675.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	616.750.281,90
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.187.371.390,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.817.528.811,40
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.207.889.525,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	44.690.675,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.149.436.109,60
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	90.736.720,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	567.235.720,40
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	757.540.061,40
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	633.093.090,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	218.946.350,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	29.064.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	272.386.740,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	112.696.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.183.204.763,10
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	923.718.863,10
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	107.269.863,10
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	794.999.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	21.450.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	259.485.900,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	259.485.900,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.904.602.080,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	455.842.080,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	326.550.080,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	12.500.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	116.792.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.448.760.000,00
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	150.960.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.297.800.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.069.520.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	596.600.000,00
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	596.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	332.920.000,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	318.900.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	14.020.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	120.000.000,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	120.000.000,00
5.2.02.08.09	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	20.000.000,00
5.2.02.08.09.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	20.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.977.726.900,20
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.070.445.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.070.445.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	907.281.900,20
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	287.965.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	619.316.900,20
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	17.760.000,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	17.760.000,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	17.760.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	204.974.070,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	133.582.530,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	95.172.090,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	38.410.440,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	71.391.540,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	11.361.960,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	36.744.000,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	23.285.580,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	595.967.280,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	595.967.280,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	231.676.800,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	364.290.480,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	123.580.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	123.580.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	123.580.000,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	7.486.406.551,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	7.486.406.551,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	7.486.406.551,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.293.907.032,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.293.907.032,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.293.907.032,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.797.369.465,60
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	136.585.119.465,60
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	136.585.119.465,60
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	57.783.690.363,60
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	52.979.393.315,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.353.300.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	546.765.486,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.152.641.700,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	158.627.791,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	5.342.365.772,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	268.335.038,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	212.250.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	212.250.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	212.250.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	82.755.106.180,80
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	59.051.399.530,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	58.096.603.170,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	58.096.603.170,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	954.796.360,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	954.796.360,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.538.855.991,74
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.527.096.199,44
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	8.527.096.199,44
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.939.404.567,30
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	7.939.404.567,30
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	40.959.145,00
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40.959.145,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	31.396.080,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	31.396.080,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	7.164.850.659,06
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	7.145.287.579,50
5.2.04.03.01.0003	Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	108.022.591,50
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	7.037.264.988,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	19.563.079,56
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	19.563.079,56
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.581.563.466,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	360.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	360.000.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	360.000.000,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	1.221.563.466,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	1.221.563.466,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Regular	1.221.563.466,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	118.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	118.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	118.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	118.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.089.171.200,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	32.089.171.200,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	32.089.171.200,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	32.089.171.200,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	32.089.171.200,00
	Jumlah Belanja	2.305.503.237.836,00
	Total Surplus/(Defisit)	-81.285.227.925,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	81.285.227.925,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	81.285.227.925,00
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	81.285.227.925,00
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	81.285.227.925,00
6.1.01.01.01.0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	81.285.227.925,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	81.285.227.925,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Cilegon,

Walikota

HELLDY AGUSTIAN